

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba dimana didirikan untuk kepentingan memberikan pelayanan kepada publik yang tidak memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Proses manajemen pada sebuah organisasi tetap berjalan pada organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan evaluasi tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya yang dilakukan pada organisasi sektor swasta (Bastian, 2016). Sektor publik menjadi pelayan masyarakat dalam setiap program yang di rencanakan dan nantinya akan dilaksanakan dan di implementasikan sebagai realisasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Setiap sarana dan prasarana serta pelayanan di rancang melalui dana anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah dengan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Anggaran dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah program dan pelayanan publik sudah terlaksana, pemerintah wajib melaporkan penggunaan dana dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk transparansi dan juga penilaian akuntabilitas dan kinerja dari organisasi sektor publik.

Peran aktif pemerintahan daerah dalam mengelola daerah nya sendiri merupakan perwujudan dari hak otonomi daerah yang diberikan kepada masing masing daerah. Pemberian hak otonomi daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dan potensi yang ada di daerah tersebut dengan harapan bahwa setiap program yang di

anggarkan dapat tepat sasaran. Peran ini tidak lepas dari anggaran yang dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggarannya sekaligus sebagai penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan. Setiap tahunnya organisasi sektor publik juga akan melakukan evaluasi guna untuk mengurangi pemborosan anggaran yang tidak diperlukan dengan hal ini diharapkan akan menciptakan kinerja yang terus mengalami perbaikan dan jadi lebih baik untuk setiap periode.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2019: 20). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja maupun kegiatan yang ada dalam organisasi. Akuntabilitas ini dapat di dinilai dalam beberapa cara namun dalam pengukuran kinerja berdasarkan anggaran dapat di ukur dengan menggunakan konsep pendekatan *value for money*. Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan menggunakan konsep *value for money* (nilai dari pada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2019: 27).

Konsep *value for money* merupakan sebuah prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu :

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* dapat tercapai di organisasi sektor publik jika organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam mewujudkan atau mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan dari pengukuran *value for money* yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya (Mardiasmo, 2019:39).

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kinerja organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Keban (2018:35), menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian

hasil *“the degree of accomplishment”* atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan (Keban, 2018:43). Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para instansi sering tidak memperhatikan kinerja instansi atau organisasi kecuali kinerja sudah amat buruk. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. Dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan tersebut maka organisasi ini harus mampu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum penataan ruang dan bangunan serta perumahan. Dari semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan penilaian untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam pelayanan publik. Capaian kinerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan yang meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **“Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Bersumber dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat penelitian bagi peneliti

Dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada.

b. Manfaat bagi perusahaan

Dapat dipergunakan sebagai evaluasi perusahaan untuk melaksanakan sistem pengendalian yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Manfaat bagi akademi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dipergunakan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya kecurangan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai analisis kinerja organisasi Sektor Publik dengan pendekatan *value for money*.